

## Analisis Tren Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Rasio Apbd Tahun 2020–2024

Dina Era Ermawati, Alifia Rosada Nibros, Ria Anggraini, Muhammad Rahman, Abdurrachman

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 20 June 2026  
Revised 20 June 2026  
Accepted 25 June 2026  
Available online 08 July 2026

#### Keywords

regional financial performance,  
regional budget, financial ratios,  
Regional Original Revenue, DKI Jakarta



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial performance trends of the Provincial Government of DKI Jakarta based on Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) ratios during the 2020–2024 period. The study employed a quantitative descriptive method with a case study and time-series approach. The data consisted of secondary data obtained from the audited Budget Realization Reports (LRA) of the DKI Jakarta Provincial Government for 2020–2024. Financial performance was analyzed using regional financial ratios, including the financial independence ratio, Regional Original Revenue (PAD) effectiveness ratio, financial efficiency ratio, revenue growth ratio, and expenditure harmony ratio. The results indicate a positive trend in DKI Jakarta's financial performance, reflected in the continuous increase in regional revenue, PAD, and regional expenditure. The financial independence ratio remained above 100%, indicating a very high level of fiscal independence and low dependence on central government transfers. The PAD effectiveness ratio declined in 2021–2022 due to the COVID-19 pandemic but exceeded 100% in 2023–2024. The financial efficiency ratio ranged from 92% to 96%, while expenditure remained dominated by operational*

*spending despite a gradual increase in capital expenditure. Overall, the DKI Jakarta Provincial Government demonstrated strong fiscal capacity and maintained stable financial performance throughout the study period.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis time series. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 yang telah diaudit. Analisis dilakukan menggunakan rasio kemandirian keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan keserasian belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami tren positif yang ditandai dengan peningkatan pendapatan daerah, PAD, dan belanja daerah. Rasio kemandirian keuangan berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai di atas 100%, yang menunjukkan rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD sempat menurun pada 2021–2022 akibat pandemi COVID-19, namun meningkat hingga melampaui 100% pada 2023–2024. Rasio efisiensi keuangan berada pada kisaran 92%–96%, sedangkan struktur belanja masih didominasi belanja operasi meskipun proporsi belanja modal terus meningkat. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat serta mampu mempertahankan stabilitas kinerja keuangan daerah selama periode penelitian.

### PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk membangun kemandirian fiskal yang kuat agar pembangunan daerah tidak terus-menerus bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mempertegas hal ini dengan menjadikan kinerja keuangan daerah sebagai tolok ukur utama

keberhasilan tata kelola pemerintahan (Deliana et al., 2023; Salsabila et al., 2024)). Salah satu instrumen yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja tersebut adalah analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memungkinkan penilaian kecenderungan kinerja antar periode secara sistematis dan terukur (Deliana et al., 2023)). Sebagai pusat pemerintahan sekaligus episentrum ekonomi nasional, Provinsi DKI Jakarta memiliki postur APBD yang paling besar di Indonesia, sehingga dinamika keuangannya senantiasa menjadi perhatian publik, akademisi, maupun pembuat kebijakan (Marliani et al., 2026)

Periode 2020 hingga 2024 merupakan fase yang penuh dinamika bagi struktur keuangan DKI Jakarta. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal 2020 memberikan tekanan luar biasa terhadap realisasi pendapatan daerah, yang tercermin dari penurunan rasio efektivitas PAD dan pertumbuhan pendapatan yang negatif (Salsabila & Fitriani, 2024). Meski demikian, sebagaimana dikemukakan oleh (Deliana et al., 2023) DKI Jakarta tetap mampu mempertahankan predikat sebagai provinsi dengan kemandirian keuangan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2020 dan 2021, meskipun kondisi darurat menuntut realokasi anggaran secara besar-besaran. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan di tengah tekanan fiskal yang luar biasa.

Memasuki fase pemulihan pasca-pandemi, prioritas kebijakan anggaran mulai beralih pada penguatan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan efisiensi belanja. (Cahyani et al., 2024) menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran belanja bukan semata soal tingginya penyerapan, melainkan sejauh mana alokasi belanja mampu mendukung prioritas pembangunan secara berkelanjutan. Kajian tersebut mencatat rata-rata tingkat efisiensi anggaran belanja DKI Jakarta sebesar 76,26% selama 2020–2023, dengan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 92,51% pada tahun 2023. Sementara itu, (Haruni & Dai, 2025) menemukan bahwa sekitar 60% program yang didanai melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta menunjukkan nilai efisiensi di atas 100%, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam akurasi perencanaan anggaran investasi daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun target kinerja dapat tercapai, mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran masih memerlukan perbaikan yang sistematis.

Kondisi fiskal DKI Jakarta memasuki periode 2022–2024 menunjukkan tren stabilisasi yang patut dikaji secara lebih mendalam. (Setiawan et al., 2026) dalam penelitiannya pada periode tersebut menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum relatif stabil, dengan rasio kemandirian fiskal yang jauh melampaui 100% dan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang konsisten di kisaran 68–70%, menunjukkan pola hubungan delegatif yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang kuat.

Studi komparatif (Marliani et al., 2026)) turut memperkuat temuan ini, di mana DKI Jakarta secara rata-rata mengungguli Jawa Barat dalam aspek kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan efisiensi belanja selama 2020–2024, meskipun Jawa Barat menunjukkan efektivitas realisasi PAD yang lebih baik. Kesenjangan antara capaian kemandirian fiskal yang tinggi di satu sisi dan masih bervariasinya efektivitas serta efisiensi di sisi lain menjadi celah penelitian (research gap) yang perlu diisi.

Dengan memanfaatkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta Portal Open Data Jakarta, penelitian ini berupaya menyajikan analisis komprehensif kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 melalui pendekatan analisis rasio APBD.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah berdasarkan data numerik yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024.

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis rasio keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan belanja daerah, pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, serta keserasian belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode penelitian.

Penelitian ini bersifat time series karena menganalisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data penelitian diperoleh dari laporan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta.

### **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio APBD tahun 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan pada analisis beberapa rasio keuangan daerah, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Rasio Keserasian Belanja

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 yang telah diaudit.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara matematis sehingga dapat digunakan dalam proses analisis statistik maupun analisis rasio keuangan daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 yang meliputi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, transfer, pembiayaan, dan surplus/defisit anggaran.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipublikasikan melalui portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta. Data utama yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020–2024 yang telah diaudit.

Selain data laporan realisasi anggaran, penelitian ini juga menggunakan sumber pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan dan analisis kinerja keuangan daerah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020–2024 yang

diperoleh melalui portal resmi PPID DKI Jakarta. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio keuangan daerah. Dokumen yang digunakan memuat data mengenai: Pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja operasi, Belanja modal, Transfer daerah, Pembiayaan daerah, Surplus/defisit APBD.

2. Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta analisis rasio APBD. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung pembahasan hasil penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan daerah. Data APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 dianalisis menggunakan rumus rasio keuangan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan daerah.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024.
2. Mengelompokkan data sesuai komponen pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.
3. Menghitung rasio keuangan daerah berdasarkan rumus yang telah ditentukan.
4. Menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan setiap tahun.
5. Membandingkan tren kinerja keuangan daerah selama periode penelitian.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil analisis penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKI Jakarta) merupakan ibu kota negara Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai daerah otonom setingkat provinsi. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan perdagangan nasional, DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Luas wilayah DKI Jakarta sekitar 664,01 km<sup>2</sup> yang terdiri atas lima wilayah kota administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta satu kabupaten administrasi yaitu Kepulauan Seribu.

Sebagai daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Pendapatan daerah DKI Jakarta sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingginya kontribusi PAD menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah tentang APBD. Melalui APBD, pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Data APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2024

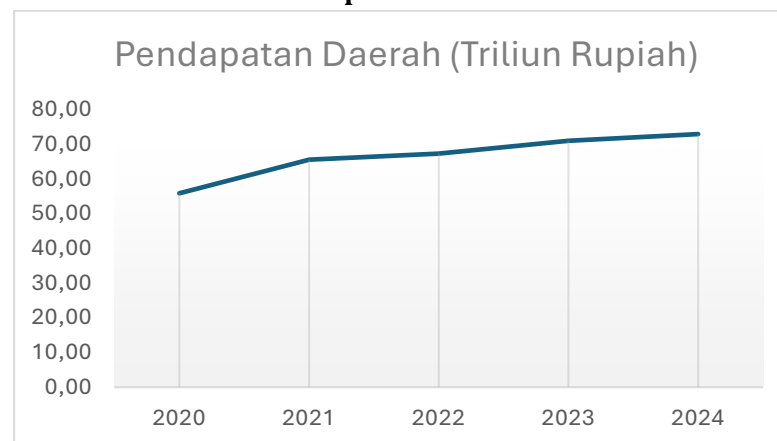
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020–2024 yang telah diaudit dan dipublikasikan melalui Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut meliputi realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menghitung rasio kinerja keuangan daerah.

**Tabel 4.1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2024**

| Tahun | Pendapatan Daerah (Rp) | PAD (Rp)           | Belanja Daerah (Rp) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 2020  | 55.887.004.237.727     | 37.414.754.711.193 | 51.716.860.929.662  |
| 2021  | 65.567.009.199.000     | 41.606.307.405.630 | 61.231.460.250.253  |
| 2022  | 67.290.479.172.308     | 45.608.404.705.630 | 64.380.358.560.806  |
| 2023  | 71.065.534.207.722     | 49.139.745.715.234 | 66.414.163.147.914  |
| 2024  | 72.952.092.926.153     | 50.742.019.272.748 | 69.628.720.772.366  |

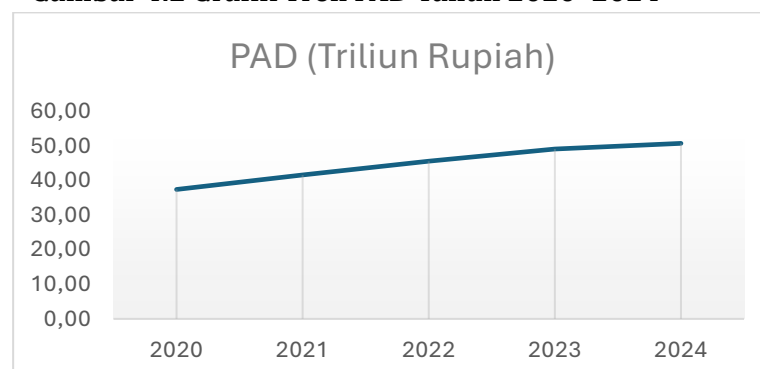
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2024 (Audited).

**Gambar 4.1 Grafik Tren Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024**



Berdasarkan Gambar 4.1, pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 pendapatan daerah sebesar Rp55,89 triliun dan meningkat menjadi Rp72,95 triliun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi fiskal daerah setelah pandemi COVID-19 serta meningkatnya penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan pendapatan transfer.

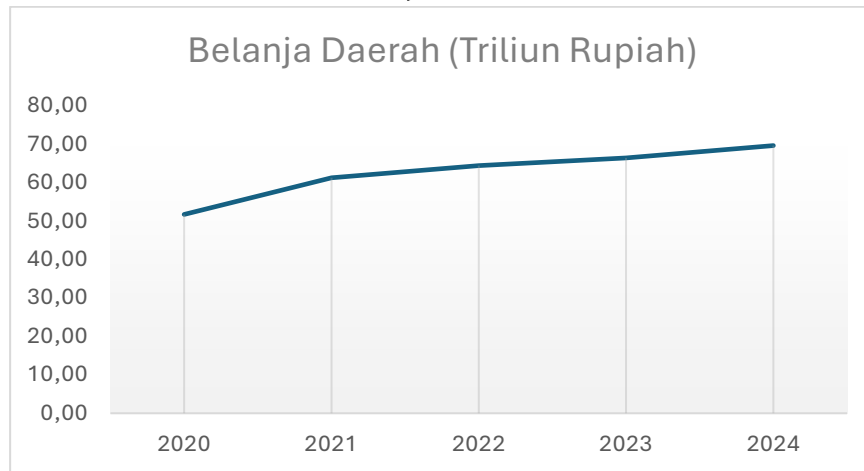
**Gambar 4.2 Grafik Tren PAD Tahun 2020–2024**



Berdasarkan Gambar 4.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahun. PAD meningkat dari Rp37,41 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp50,74 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam

menggali sumber-sumber pendapatan daerah semakin baik sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.

**Gambar 4.2 Grafik Tren Belanja Daerah Tahun 2020–2024**



Berdasarkan Gambar 4.3, realisasi belanja daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 belanja daerah sebesar Rp51,72 triliun dan meningkat menjadi Rp69,63 triliun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19.

Berdasarkan Tabel 4.1 serta Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3, terlihat bahwa pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pendapatan daerah meningkat dari Rp55,89 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp72,95 triliun pada tahun 2024. PAD meningkat dari Rp37,41 triliun menjadi Rp50,74 triliun, sedangkan belanja daerah meningkat dari Rp51,72 triliun menjadi Rp69,63 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021.

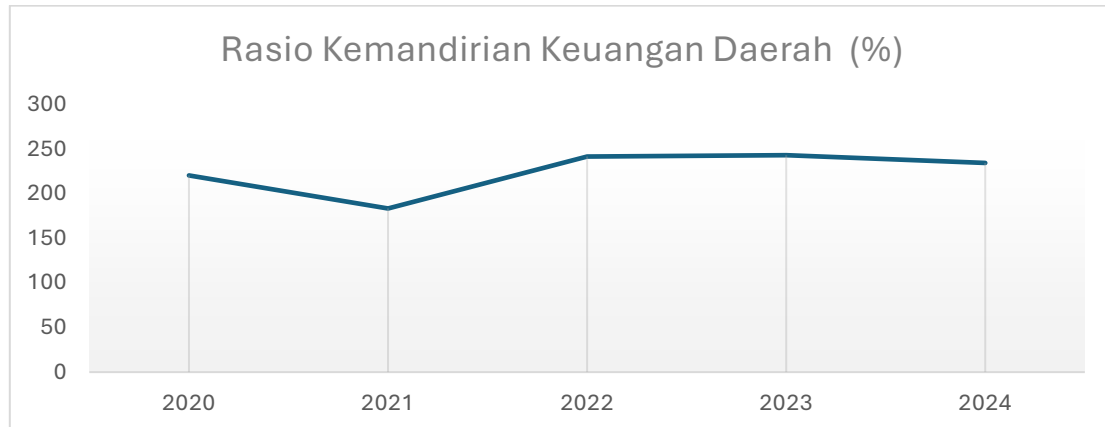
#### **4.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020–2024**

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang terdiri atas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kesenjangan Belanja. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode 2020–2024.

##### **4.2.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

**Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020–2024**

| Tahun | PAD (Rp)           | Pendapatan Transfer (Rp) | Rasio (%) |
|-------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 2020  | 37.414.754.711.193 | 16.962.899.288.632       | 220,57    |
| 2021  | 41.606.307.405.630 | 22.673.794.344.052       | 183,5     |
| 2022  | 45.608.404.705.630 | 18.860.858.779.549       | 241,82    |
| 2023  | 49.139.745.715.234 | 20.199.636.472.034       | 243,27    |
| 2024  | 50.742.019.272.748 | 21.620.905.241.381       | 234,69    |

**Gambar 4.4 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020–2024**

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.4, rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020–2024 berada pada kategori sangat tinggi. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 243,27%, sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 183,50%.

Penurunan rasio pada tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, nilai rasio yang tetap berada di atas 100% menunjukkan bahwa PAD masih menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Pada tahun 2022 hingga 2024, rasio kembali meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya penerimaan pajak daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat dan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerah melalui PAD.

#### 4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

**Tabel 4.3 Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020–2024**

| Tahun | Target PAD (Rp)    | Realisasi PAD (Rp) | Rasio (%) |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|
| 2020  | 38.085.985.616.631 | 37.414.754.711.193 | 98,24     |
| 2021  | 45.182.087.250.967 | 41.606.307.405.630 | 92,09     |
| 2022  | 56.662.834.735.791 | 45.608.404.705.630 | 80,49     |
| 2023  | 48.442.043.648.831 | 49.139.745.715.234 | 101,44    |
| 2024  | 50.466.744.400.463 | 50.742.019.272.748 | 100,55    |

**Gambar 4.5 Grafik Rasio Efektivitas PAD Tahun 2020–2024**

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.5, rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Tahun 2022 menjadi tahun dengan rasio efektivitas terendah sebesar 80,49%, sedangkan tahun 2023 menjadi tahun dengan rasio tertinggi sebesar 101,44%.

Rendahnya efektivitas pada tahun 2021–2022 dipengaruhi oleh masih adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah sebagai komponen utama PAD.

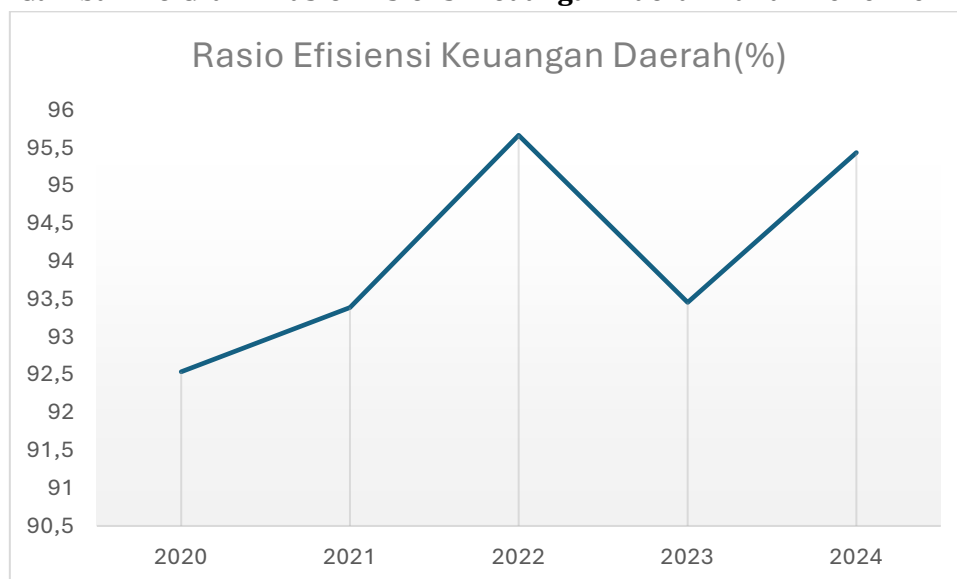
Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas PAD berhasil melampaui 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah setelah kondisi ekonomi kembali stabil.

#### 4.2.3 Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

**Tabel 4.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2020–2024**

| Tahun | Belanja Daerah (Rp) | Pendapatan Daerah (Rp) | Rasio (%) |
|-------|---------------------|------------------------|-----------|
| 2020  | 51.716.860.929.662  | 55.887.004.237.727     | 92,54     |
| 2021  | 61.231.460.250.253  | 65.567.009.199.000     | 93,39     |
| 2022  | 64.380.358.560.806  | 67.290.479.172.308     | 95,67     |
| 2023  | 66.414.163.147.914  | 71.065.534.207.722     | 93,46     |
| 2024  | 69.628.720.772.366  | 72.952.092.926.153     | 95,44     |

**Gambar 4.6 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2020–2024**



Rasio efisiensi DKI Jakarta selama periode penelitian berada pada kisaran 92%–96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Pada tahun 2020 dan 2021, tingginya rasio efisiensi dipengaruhi oleh kebijakan refocusing anggaran dan peningkatan belanja untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, serta penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

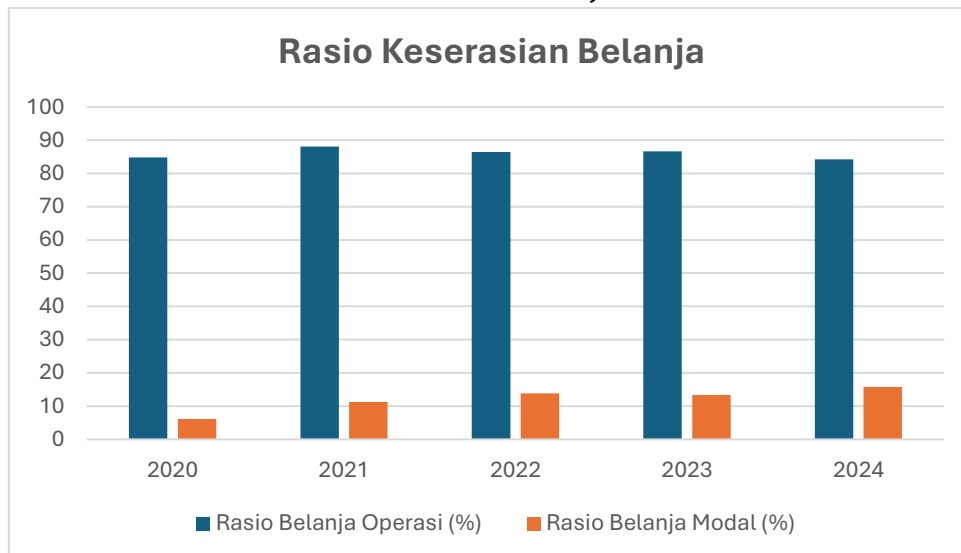
Meskipun rasio efisiensi masih relatif tinggi hingga tahun 2024, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga APBD masih menghasilkan surplus setiap tahun.

#### 4.2.4 Analisis Rasio Kesorasian Belanja

**Tabel 4.5 Rasio Kesorasian Belanja Tahun 2020–2024**

| Tahun | Belanja Operasi (Rp) | Belanja Modal (Rp) | Total Belanja (Rp) | Rasio Belanja Operasi (%) | Rasio Belanja Modal (%) |
|-------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2020  | 43.835.699.863.256   | 3.173.223.520.882  | 51.716.860.929.662 | 84,76                     | 6,14                    |
| 2021  | 53.925.743.776.335   | 6.865.827.016.719  | 61.231.460.250.253 | 88,07                     | 11,21                   |
| 2022  | 55.642.186.969.752   | 8.880.194.842.704  | 64.380.358.560.806 | 86,43                     | 13,79                   |
| 2023  | 57.565.903.079.616   | 8.857.260.058.298  | 66.414.163.147.914 | 86,68                     | 13,34                   |
| 2024  | 58.623.539.616.823   | 11.004.785.255.543 | 69.628.720.772.366 | 84,19                     | 15,81                   |

**Gambar 4.7 Grafik Rasio Kesorasian Belanja Tahun 2020–2024**



Berdasarkan Tabel 4.5 dan Gambar 4.7, struktur belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020–2024 masih didominasi oleh belanja operasi. Rasio belanja operasi berada pada kisaran 84,19%–88,07% dari total belanja daerah. Tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta berbagai program pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, rasio belanja modal menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari 6,14% pada tahun 2020 menjadi 15,81% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah setelah berakhirnya masa penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020 dan 2021, alokasi belanja modal masih relatif rendah karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, khususnya pada sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Namun sejak tahun 2022, proporsi belanja modal meningkat secara

bertahap seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah dan meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah daerah.

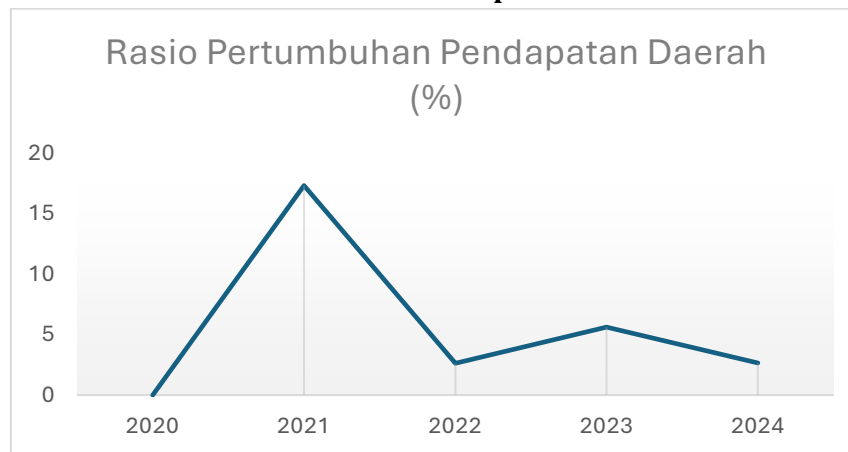
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode penelitian masih berorientasi pada belanja operasi, namun terdapat kecenderungan peningkatan belanja modal yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 4.2.5 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

**Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024**

| Tahun | Pendapatan Daerah (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|-------|------------------------|-----------------|
| 2020  | 55.887.004.237.727     | -               |
| 2021  | 65.567.009.199.000     | 17,32           |
| 2022  | 67.290.479.172.308     | 2,63            |
| 2023  | 71.065.534.207.722     | 5,61            |
| 2024  | 72.952.092.926.153     | 2,65            |

**Gambar 4.8 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020–2024**



Tahun 2021 mencatat pertumbuhan pendapatan tertinggi sebesar 17,32%. Peningkatan ini terjadi karena mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah periode awal pandemi serta meningkatnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2022 hingga 2024 pertumbuhan tetap positif, meskipun cenderung melambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah tetap meningkat setiap tahun, namun laju pertumbuhannya mulai kembali normal setelah lonjakan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio APBD tahun 2020–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif selama periode 2020–2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori sangat tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah selama periode penelitian berada di atas 100%, dengan nilai tertinggi sebesar 243,27% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendapatan

daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat relatif rendah.

3. Tingkat efektivitas PAD mengalami fluktuasi, namun secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Rasio efektivitas PAD sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas berhasil melampaui 100%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD mampu melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Tingkat efisiensi keuangan daerah berada pada kategori kurang efisien namun masih terkendali. Rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kisaran 92%–96%. Meskipun sebagian besar pendapatan digunakan untuk membiayai belanja daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kondisi fiskal tetap stabil.
5. Struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, namun belanja modal menunjukkan tren peningkatan. Rasio belanja operasi berada pada kisaran 84%–88%, sedangkan rasio belanja modal meningkat dari 6,14% pada tahun 2020 menjadi 15,81% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur dan investasi daerah.
6. Pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan tren positif selama periode penelitian. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 17,32%, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan tetap positif meskipun cenderung melambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem perpajakan daerah, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mempertahankan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan memperkuat perencanaan program dan pengendalian belanja agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Proporsi belanja modal perlu terus ditingkatkan secara bertahap untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio APBD agar setiap perubahan kondisi fiskal dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melakukan perbandingan antarprovinsi atau menambahkan indikator kinerja keuangan lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah.

**REFERENSI**

- Cahyani, D., Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2024). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Di DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 44–50. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.513>
- Deliana, M., Sujadi, D., & Holiawati. (2023). *ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PENILAIAN KINERJA APBD PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2020-2021*. 2.
- Haruni, A., & Dai, R. M. (2025). PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Analisis Efisiensi Anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pada BUMD Provinsi DKI Jakarta. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 143–159. <https://doi.org/10.24905/permanav17i3.798>
- Marliani, N., Laelasari, W., Kartika Sari, D., & Riny Rahmawati, N. (2026). Kinerja Keuangan Jawa Barat dan DKI Jakarta: Studi Komparatif Tahun 2020-2024. In *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* (Vol. 18, Number 1).
- Salsabila, A., Fitriani, D., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, P., & Pamulang, U. (2024). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penelitian Kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2021. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 3(2), 893–899. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index>
- Setiawan, A. B., Nuraeni, A., Setiana, H., Luthfiah, H. A., Cahyani, R., & Rakhaningrum, S. (2026). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022-2024. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25.
- Perangin-Angin, P. G. B., Natalian, E. A., & Bharata, R. W. (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019–2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 173–183
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1), 83–93.